



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN-PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka ada beberapa produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dimaksud, sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menetapkan :

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN-
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Pasal I

Mencabut Peraturan Daerah – Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1984 tentang Uang Pengganti Biaya Pembuatan Dokumen Lelang;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1986 tentang Prakuilifikasi Bidang Pekerjaan Pemborongan, Bidang Pekerjaan Konsultansi, Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Peternakan;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1986 tentang Usaha dan Penggolongan Losmen;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1987 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1987 tentang Usaha Pondok Wisata;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1987 tentang Usaha Penginapan Remaja;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1989 tentang Usaha Promosi Wisata;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1989 tentang Rekreasi Hiburan Umum;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pembinaan Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1996 tentang Uang Perangsang Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Izin Trayek Serta Ketentuan Besarnya Pungutan Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1990;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2002

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD**

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ttd

**BAMBANG S PRIYOHADI
NIP. 110021674**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH – PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISYIMEWA YOGYAKARTA SEHUBUNGAN DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, maka ada beberapa Peraturan daerah Propinsi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Disamping itu dengan berlakunya Undang-undang Nonmor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 terdapat materi Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dimaksud, sehingga perlu dicabut.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yopgyakarta Sehubungan sengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.